

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Kesejahteraan ekonomi ialah sebuah tujuan utama dari proses pembangunan ekonomi yang dirancang oleh seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia. Dalam proses mencapai kesejahteraan ekonomi ini, Indonesia dipertemukan dengan berbagai masalah ekonomi mulai dari kemiskinan, pengangguran, ketimpangan, dan permasalahan lainnya. Demi mendukung pembangunan ekonomi tersebut, berbagai upaya telah dilakukan salah satunya adalah mendorong pertumbuhan ekonomi kearah yang lebih baik. Hal yang menjadi dilema saat ini adalah pemerintah jauh lebih fokus pada upaya pertumbuhan ekonomi namun tidak terlalu memperhatikan perihal kesenjangan atau ketidakmerataan ekonomi itu sendiri. Permasalahan ketimpangan ekonomi perlu menjadi fokus dalam penetapan kebijakan karena proses peningkatan kesejahteraan ekonomi seharusnya diiringi dengan peningkatan kualitas hidup penduduknya secara keseluruhan.

Adapun dilema yang dimaksud adalah ketika pertumbuhan ekonomi tinggi, belum tentu menciptakan kesejahteraan yang merata bagi masyarakat. Hal ini berdasarkan pada teori dari Simon Kuznets (1995) dalam hipotesisnya yang menyatakan bahwa terdapat kurva U terbalik yang merepresentasikan kondisi dimana distribusi pendapatan akan semakin tidak merata ketika pembangunan dimulai, tetapi akan semakin merata disaat pembangunan telah mencapai pada tingkat tertentu (Fauzia & Suseno, 2017). Ketimpangan yang semakin tinggi dapat menimbulkan permasalahan ekonomi, kecemburuan sosial, kerawanan disintegrasi, dan kriminalitas (BPS DIY & Bappeda DIY, 2020). Adapun untuk mengukur ketimpangan pendapatan dapat menggunakan beberapa cara diantaranya menggunakan kurva lorenz, koefisien gini, indeks williamson, dan indeks theils. (Riandi & Varlitya, 2020). Indeks Theil dan Williamson dapat menghitung kesenjangan pendapatan antar sub wilayah, antar wilayah, kontribusi masing-masing wilayah/sub wilayah terhadap kesenjangan pendapatan wilayah secara keseluruhan namun memiliki asumsi bahwa kualitas pendapatan

masyarakat dalam setiap wilayah/sub wilayah pengamatan adalah homogen. Hal ini tentu belum dapat memperlihatkan kondisi masyarakat yang berbeda-beda dalam suatu wilayah. Permasalahan tersebut baru terjawab dengan model Koefisien Gini yang dikembangkan oleh ahli statistika berkebangsaan Italia yaitu Corrado Gini (1912). Koefisien Gini atau gini rasio adalah suatu ukuran dispersi statistik terhadap distribusi kelompok pendapatan dalam suatu wilayah Indeks. Keistimewaan dari gini rasio sebagai alat pengukur ketimpangan memiliki hasil yang dapat disajikan secara geometris, sehingga terdapat dua aspek yakni aspek matematis dan aspek visual berbentuk kurva dengan nama kurva Lorenz. Tidak hanya itu, gini rasio juga mampu memenuhi *desirable property* dari ukuran kesenjangan (Heryanah, 2017). Berhubungan dengan penelitian ini yang berfokus pada kesenjangan pendapatan kelompok masyarakat maka alat pengukur ketimpangan pendapatan yang dipilih adalah koefisien gini atau gini rasio.

Tabel 1 . Urutan 10 Besar Provinsi dengan Gini Rasio Tertinggi di Indonesia Tahun 2016-2020

NO	Gini Rasio Perkotaan+Perdesaan Semester 2 (September)									
	2015	2016	2017	2018	2019	2020				
1	PAPUA BARAT 0.428	DI YOGYAKARTA 0.425	DI YOGYAKARTA 0.44	DI YOGYAKARTA 0.422	DI YOGYAKARTA 0.428	DI YOGYAKARTA 0.437				
2	JAWA BARAT 0.426	GORONTALO 0.41	SULAWESI SELATAN 0.429	GORONTALO 0.417	GORONTALO 0.410	GORONTALO 0.406				
3	DKI JAKARTA 0.421	JAWA BARAT 0.402	JAWA TIMUR 0.415	JAWA BARAT 0.405	JAWA BARAT 0.398	DKI JAKARTA 0.400				
4	DI YOGYAKARTA 0.42	JAWA TIMUR 0.402	DKI JAKARTA 0.409	PAPUA 0.398	SULAWESI TENGGARA 0.393	JAWA BARAT 0.398				
5	SULAWESI SELATAN 0.404	PAPUA BARAT 0.401	GORONTALO 0.405	SULAWESI TENGGARA 0.392	DKI JAKARTA 0.391	PAPUA 0.395				
6	JAWA TIMUR 0.403	SULAWESI SELATAN 0.400	SULAWESI TENGGARA 0.404	NUSA TENGGARA BARAT 0.391	SULAWESI SELATAN 0.391	SULAWESI TENGGARA 0.388				
7	GORONTALO 0.401	PAPUA 0.399	PAPUA 0.398	PAPUA BARAT 0.391	PAPUA 0.391	NUSA TENGGARA BARAT 0.386				
8	BALI 0.399	DKI JAKARTA 0.397	SULAWESI UTARA 0.394	DKI JAKARTA 0.390	PAPUA BARAT 0.381	SULAWESI SELATAN 0.382				
9	PAPUA 0.392	BANTEN 0.392	JAWA BARAT 0.393	SULAWESI SELATAN 0.388	SULAWESI UTARA 0.376	PAPUA BARAT 0.376				
10	BANTEN 0.386	SULAWESI TENGGARA 0.388	PAPUA BARAT 0.387	SULAWESI UTARA 0.372	NUSA TENGGARA BARAT 0.374	BALI 0.369				
	INDONESIA 0.402	0.394	0.391	0.384	0.38	0.385				

Sumber : Data diolah, Badan Pusat Statistik, (2015-2021)

Berlandaskan pada data yang berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS), gini rasio pada semester 1 dan 2 tahun 2020, terdapat lima Provinsi dengan angka ketimpangan tertinggi meliputi DI Yogyakarta, Gorontalo, Jawa Barat, DKI Jakarta dan Papua. Kelima Provinsi tersebut mempunyai aktivitas ekonomi yang

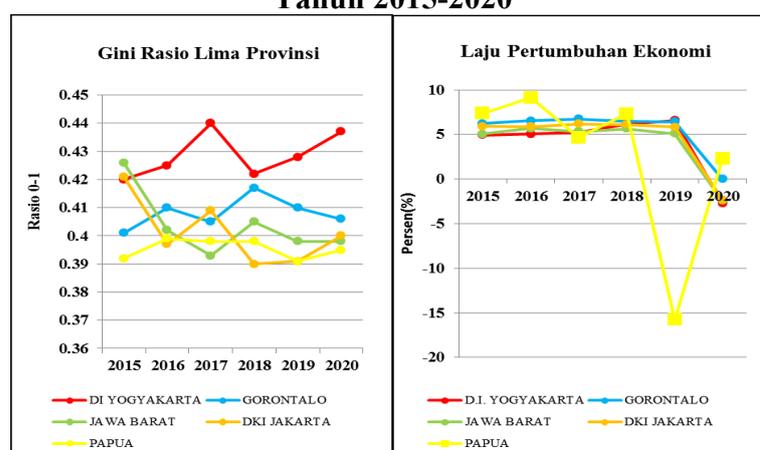
Hikmah Nurain, 2022

ANALISIS FAKTOR PENYEBAB KETIMPANGAN PENDAPATAN PADA LIMA PROVINSI TERTIMPANG DI INDONESIA

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi S1 Ekonomi Pembangunan
[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]

baik tercermin dari pertumbuhan ekonomi setiap daerah yang secara mayoritas berada di posisi lebih tinggi dari pertumbuhan nasional dalam kurun waktu 6 tahun terakhir, namun kelima Provinsi ini ternyata memiliki angka ketimpangan diatas ketimpangan nasional dalam waktu yang bersamaan, dan selalu masuk kedalam sepuluh besar Provinsi dengan ketimpangan tertinggi sejak tahun 2015, hingga kemudian menempati posisi 5 tertinggi pada tahun 2020. Berdasarkan tabel 1 diatas terlihat bahwa kelima Provinsi ini konsisten berada di 10 besar dan cenderung memiliki posisi yang meningkat dari tahun 2016 hingga tahun 2020. Khususnya pada tahun 2020 itu sendiri pertumbuhan ekonomi hampir di seluruh Indonesia menurun akibat adanya pandemi Covid-19, tampak dari data laju pertumbuhan ekonomi dimana lima Provinsi ini mengalami penurunan kecuali papua yang justru meningkat. Hal ini terjadi karena adanya penurunan aktivitas lapangan usaha di bidang pertambangan dan penggalian secara drastis pada tahun 2019 dimana penurunan mencapai -43.21% dan ekspor luar negeri pun ikut menurun hingga -69.10% (BPS Provinsi Papua, 2020). Berlandaskan pada teori Kuznets, lazimnya ketika pertumbuhan ekonomi menurun ketimpangan ikut menurun, namun data menunjukkan bahwa gini rasio kelima provinsi cenderung meningkat kecuali pada provinsi Gorontalo. Alasan terkait mengapa hal ini terjadi dapat terlihat dari perbandingan antara koefisien gini dengan laju pertumbuhan ekonomi sebagai berikut.

Grafik 1. Koefisien Gini dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Lima Provinsi Tahun 2015-2020



Sumber : Badan Pusat Statistik (2015-2020)

Berdasarkan grafik diatas jika dilihat dari kondisi per Provinsi, Provinsi dengan ketimpangan tertinggi yakni DI Yogyakarta secara mayoritas memiliki

Hikmah Nurain, 2022

ANALISIS FAKTOR PENYEBAB KETIMPANGAN PENDAPATAN PADA LIMA PROVINSI TERTIMPANG DI INDONESIA

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi S1 Ekonomi Pembangunan
 [www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]

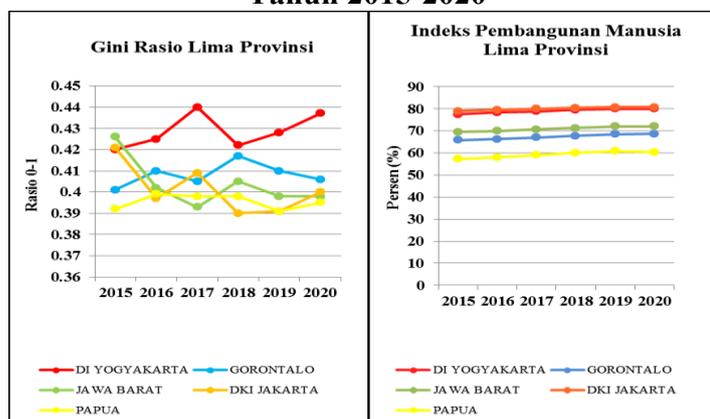
angka ketimpangan yang berfluktuasi namun cenderung meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang stabil. Ketimpangan pendapatan di DIY terjadi disebabkan oleh perbedaan dari sisi pertumbuhan ekonomi daerah dan keterbatasan yang dimiliki setiap daerah, serta adanya pemusatan pembangunan di daerah yang sudah baik seperti Kota Yogyakarta dan Kab. Kulon Progo (Kusuma, Sarfiah, & Septiani, 2019). Di DIY pula telah terjadi *gap* pada tahun 2018 dimana pertumbuhan ekonomi yang meningkat cukup tinggi mencapai 0.94% justru diiringi dengan ketimpangan yang menurun. Hal ini disebabkan oleh adanya efektifitas dana desa yang telah berhasil menekan jumlah kemiskinan dan pengangguran di pedesaan, sehingga sudah tiada lagi desa tertinggal di wilayah DIY pada tahun 2018 (Kanwil DJPb Provinsi DIY, 2018).

Provinsi Gorontalo memiliki keadaan ketimpangan yang cenderung meningkat pada tahun 2015-2018, hal ini dikarenakan adanya perbedaan kondisi demografis, potensi sumber daya alam, serta sulitnya akses mobilitas barang, jasa, dan tenaga kerja sehingga menyebabkan adanya ketimpangan pembangunan antar wilayah (Bappeda Provinsi Gorontalo, 2019). Terdapat *gap* pada tahun 2018 yang dimana ketimpangan naik ketika pertumbuhan ekonomi menurun, hal ini dikarenakan adanya perlambatan kinerja para tenaga kerja di sektor pertanian akibat penurunan hasil panen di tahun 2018 (Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo, 2018). Pada Provinsi Jawa Barat, *gap* terjadi di tahun 2016 dimana pertumbuhan ekonomi yang meningkat ternyata bersamaan dengan penurunan ketimpangan, hal ini dikarenakan adanya kenaikan investasi daerah yang mampu meningkatkan akses ekonomi dan peningkatan pelayanan publik (Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat, 2016). DKI Jakarta memiliki *gap* pada tahun 2019 dimana ketika laju PDRB menurun, ketimpangan sedikit meningkat, berdasarkan data BPS salah satu penyebabnya adalah menurunnya realisasi belanja modal tahun 2019 (Badan Pusat Statistik, 2020). Adapun Provinsi Papua memiliki kondisi naiknya laju PDRB yang justru diiringi dengan menurunnya tingkat ketimpangan pendapatan pada tahun 2018, hal ini terjadi karena adanya penurunan persentase penduduk miskin dan tingkat pengangguran karena adanya alokasi Dana Otonomi Khusus, Dana Alokasi Khusus Fisik, serta dana desa pada nominal yang besar guna

pengentasan kemiskinan dan menyokong pembangunan infrastruktur di Provinsi Papua (Kanwil DJPb Provinsi Papua, 2019).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan faktor lainnya yang diduga mempengaruhi ketimpangan pendapatan. IPM di suatu daerah menggambarkan kesejahteraan masyarakatnya secara umum dari sisi pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Dalam buku Priyono & Ismail (2012), terdapat teori dari Gary S. Becker tentang *human capital* dimana dikatakan bahwa dalam modal manusia investasi yang paling penting berada pada pendidikan, pelatihan, dan kesehatan. Teori ini menerangkan bahwasanya manusia akan mempunyai pekerjaan dengan upah lebih besar apabila pendidikannya lebih tinggi, dibandingkan dengan manusia yang berpendidikan rendah (Islami & SBM, 2018). Peningkatan IPM artinya terdapat peningkatan pada pendidikan, kesehatan, dan daya beli penduduk itu sendiri, sehingga peningkatan IPM akan menurunkan ketimpangan pendapatan (Kusuma, Sarfiah, & Septiani, 2019). Berdasarkan hal tersebut, kesimpulan yang dapat diambil ialah meningkatnya kualitas manusia suatu daerah diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakatnya sehingga mampu mengurangi kesenjangan pendapatan antar masyarakat.

Grafik 2. Koefisien Gini dan Indeks Pembangunan Manusia Lima Provinsi Tahun 2015-2020

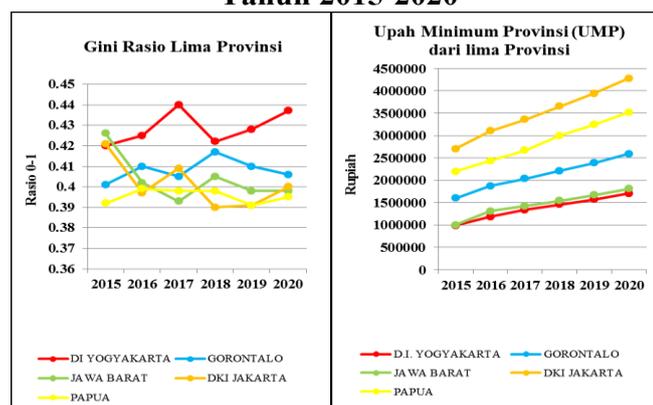


Sumber : Badan Pusat Statistik (2015-2020)

Grafik diatas menyajikan data bahwa IPM di lima Provinsi mayoritas mengalami peningkatan dalam 6 tahun terakhir. BPS mencatat dalam rentang waktu tahun 2016 hingga 2020, diperoleh fakta bahwa DIY merupakan daerah dengan angka IPM tertinggi kedua di Indonesia, namun ternyata ketimpangan di daerah tersebut merupakan yang tertinggi diantara Provinsi lain hal ini

dikarenakan tidak meratanya kualitas SDM terutama antara Kota Yogyakarta dengan Kabupaten Gunung Kidul (BPS DIY & Bappeda DIY, 2020). Provinsi DKI Jakarta sebagai daerah dengan angka IPM tertinggi nomor satu di Indonesia juga tidak luput dari ketimpangan pendapatan hal ini dikarenakan meskipun kualitas IPM baik, namun banyaknya lapangan pekerjaan yang ada tidaklah sebanding dengan banyaknya pencari kerja yang ada sehingga terjadi ketimpangan pendapatan (Katadata, 2021). Adapun Jawa Barat dengan IPM peringkat ke 10 tertinggi juga mengalami masalah ketimpangan pendapatan hal ini dikarenakan pembangunan fasilitas pendidikan, kesehatan yang kurang merata di Jawa Barat sehingga kualitas manusianya pun tidak merata (Septiyanto & Tusianti, 2020). Teruntuk Provinsi Gorontalo dan Papua dimana IPM disana rendah bahkan Papua berada pada posisi IPM terendah dalam 34 Provinsi, hal ini dikarenakan masih rendahnya pembangunan infrastruktur yang dapat menunjang pembangunan IPM di wilayah tersebut (Sofilda, 2019). Artinya kualitas sumber daya manusia yang baik ternyata tidak selalu diiringi dengan ketimpangan pendapatan yang rendah pula, maka hal ini bertentangan dengan teori Gary yang menjelaskan bahwasanya kualitas manusia yang membaik seharusnya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

Grafik 3. Koefisien Gini dan Upah Minimum Provinsi (UMP) Lima Provinsi Tahun 2015-2020



Sumber : Badan Pusat Statistik (2015-2020)

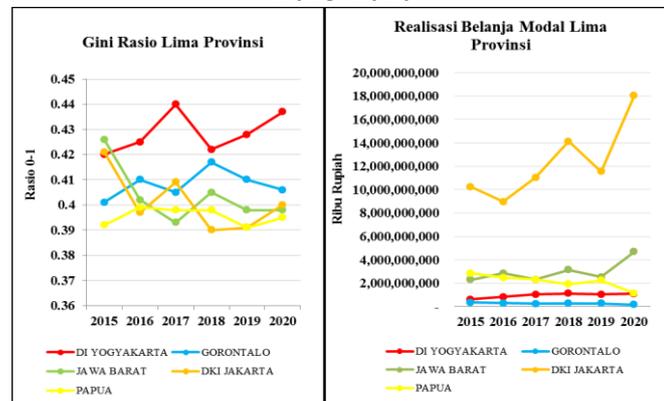
Faktor selanjutnya adalah upah minimum sebagai penyebab ketimpangan pendapatan. Menurut Hugh Rockoff dalam buku Priyono & Ismail (2012), dijelaskan terkait teori Kontrol Harga yang menyatakan bahwa pemberlakuan upah minimum diperuntukan demi adanya peningkatan pendapatan pada golongan

pekerja miskin yang bekerja di pasar. Berdasarkan pendapat Hugh tersebut dapat disimpulkan bahwa penetapan upah minimum diberlakukan demi meningkatkan pendapatan masyarakat miskin demi mempersempit ketimpangan pendapatan. Berdasarkan Grafik diatas, terlihat bahwa UMP di lima Provinsi selalu mengalami peningkatan. Menurut peraturan yang berlaku kala itu yakni Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015, dimana rumus perhitungan upah minimum itu sendiri didapatkan dari hasil perkalian antara upah minimum tahun berjalan dengan hasil penjumlahan antara tingkat inflasi nasional dengan tingkat pertumbuhan PDB tahun berjalan, kemudian hasil tersebut akan dijumlahkan dengan upah minimum tahun berjalan. Adapun upah minimum tahun berjalan ini digunakan sebagai dasar perhitungan upah minimum yang akan diterapkan dalam perhitungan upah minimum, dimana angka tersebut sudah berdasarkan dengan kebutuhan hidup layak. Berdasarkan data BPS, diketahui bahwa DIY ternyata memiliki tingkat UMP terendah di Indonesia sehingga diduga mempengaruhi posisi DIY sebagai daerah dengan ketimpangan tertinggi di Indonesia. Adapun hal ini terjadi dikarenakan upah yang diperoleh para pekerja bila dikomparasikan dengan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang meningkat setiap tahunnya bernilai lebih rendah sehingga belum mencukupi kebutuhan masyarakat (Prasetyo & Permatasari, 2020).

Bertolak belakang dengan DIY, DKI Jakarta dan Papua ternyata memiliki UMP tertinggi di Indonesia namun masih tersandung dengan masalah ketimpangan pendapatan hal ini dikarenakan 57.28% buruh/karyawan/pegawai di DKI Jakarta menerima upah/gaji di bawah UMP (BPS DKI Jakarta, 2019). Begitu pula dengan Provinsi Gorontalo dan Papua yang termasuk dalam daerah Kawasan Timur Indonesia (KTI), dimana 60% lebih tenaga kerja di wilayah KTI bermatapercaharian di sektor nonformal dan sektor pertanian (Bappenas, 2018). Berdasarkan grafik, dapat diketahui bahwa peningkatan UMP dari tahun 2015 hingga tahun 2016 di kelima daerah memiliki rata-rata lebih dari 10%, hal ini karena ketetapan PP Nomor 78 Tahun 2015 baru bisa diterapkan di tahun 2016. Oleh karena itu pada tahun 2017, Kemnaker meningkatkan UMP sebanyak 8.25% dari tahun sebelumnya, hal ini berdasarkan asumsi dari inflasi 3.07% dan pertumbuhan ekonomi tahun 2017. Pada tahun 2018, 2019, dan 2020 UMP

kembali dinaikkan masing-masing sebesar 8.71%, 8.03% , dan 8.51% dengan asumsi yang sama dengan tahun 2017. Ketetapan terkait UMP itu berlaku untuk keseluruhan provinsi di Indonesia (Mangeswuri, 2020). Jika dilihat berdasarkan kenaikan harga yang dilihat dari Indeks Harga Konsumen, dari 5 Provinsi didapati fakta bahwa IHK setiap Provinsi yang diwakili oleh kota-kota besar di masing-masing Provinsi ternyata selalu meningkat dari tahun 2015-2019. Hal tersebut memberi bukti bahwa tingkat upah minimum yang tinggi sekalipun tak selalu bisa dinikmati secara merata oleh masyarakat di beberapa daerah sehingga berdampak pada gini rasio.

Grafik 4. Koefisien Gini dan Realisasi Belanja Modal Lima Provinsi Tahun 2015-2020



Sumber : Badan Pusat Statistik (2015-2020)

Faktor berikutnya yang dipandang mampu mempengaruhi tingkat ketimpangan pendapatan adalah belanja modal pemerintah daerah Provinsi. Secara umum alokasi belanja modal pemerintah ini difungsikan untuk membangun fasilitas publik yang dibutuhkan suatu daerah dengan harapan dapat meningkatkan intensitas kegiatan ekonomi serta memperbesar penyerapan tenaga kerja, sehingga ketimpangan pendapatan pun akan menurun (Anshari, Azhar, & Ariusni, 2018). Berdasarkan data realisasi belanja modal diatas, dapat kita ketahui bahwa DIY ternyata memiliki realisasi belanja modal yang mayoritas selalu meningkat dari tahun ke tahun, namun permasalahan yang ada ialah realisasi belanja modal tersebut termasuk kategori rendah jika dibandingkan dengan daerah lain, dan pengadaannya pun masih terpusat pada daerah tertentu seperti Kulon Progo (BPS DIY & Bappeda DIY, 2020), sehingga pemerataan

infrastruktur penyokong perekonomian pun tidak merata yang akhirnya mampu menciptakan ketimpangan pendapatan.

Provinsi dengan realisasi belanja modal tertinggi adalah DKI Jakarta selaku Ibu Kota Negara sekaligus pusat perekonomian. Tingginya Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh oleh DKI Jakarta membuat keleluasaan bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan belanja modal atau bantuan sosial untuk masyarakat (Kanwil DJPb Provinsi DKI Jakarta, 2021). Ketimpangan di DKI Jakarta terjadi akibat adanya peningkatan jumlah penduduk DKI setiap tahunnya dan tingginya arus urbanisasi (Nadya & Syafri, 2019), selain itu jumlah pengangguran di DKI Jakarta juga cukup tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa Ibu Kota dengan fasilitas yang memadai sekalipun masih tidak terlepas dari masalah ketimpangan jika permasalahan lain seperti jumlah penduduk dan pengangguran belum teratasi (BPS DKI Jakarta, 2021). Provinsi Gorontalo memiliki realisasi belanja modal yang tergolong rendah dikarenakan dana APBD di Provinsi Gorontalo sebagian besar dipergunakan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah (Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo, 2019). Belanja barang operasional menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.02/2011, ialah pembelian barang maupun jasa habis pakai yang diperuntukkan guna memenuhi keperluan pokok suatu satuan kerja yang secara umum bersifat internal. Belanja operasional ini meliputi pembelian keperluan kantor, bahan makanan, pengiriman surat dinas, termasuk honor yang terkait pada operasional satuan kerja dan lain sebagainya. Belanja modal yang rendah ini membuat infrastruktur di daerah Gorontalo dapat dikatakan belum memadai, sehingga menyebabkan alokasi investasi pun tidak merata. Hal ini terjadi karena investor tentunya lebih tertarik pada wilayah dengan fasilitas baik seperti jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, prasarana perhubungan, asuransi, perbankan, dan sumber daya manusia yang tersedia. Akibatnya daerah yang fasilitasnya belum memadai akan semakin tertinggal dan menyebabkan ketimpangan (Sudirman & Mahadi, 2021).

Berbagai penelitian telah dilakoni oleh para peneliti sebelumnya guna mencoba melihat pengaruh dari pertumbuhan ekonomi, IPM, tingkat upah minimum dan belanja modal terhadap ketimpangan pendapatan. Beberapa penelitian tersebut diantaranya ialah penelitian yang dilakukan oleh Rosa dan

Sovita (2016), dimana mereka menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh yang signifikan dan berkoeffisien negatif terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Tengah. Bertolak belakang dengan Rosa dan Sovita, Kardita, dkk (2018), menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Bali. Disisi lain Anshari, dkk (2018) meneliti terkait pengaruh upah minimum dan belanja modal terhadap ketimpangan nasional dan didapati hasil bahwa keduanya berpengaruh signifikan namun upah minimum memiliki pengaruh negatif, sedangkan belanja modal berpengaruh positif. Berlainan dengan hal tersebut, menurut penelitian Hariani (2019) Upah minimum ternyata tidak signifikan berpengaruh di Jawa Timur, dalam penelitian Hariani ini pula diperoleh hasil bahwa IPM berpengaruh signifikan dan berkoeffisien positif terhadap ketimpangan, namun kesimpulan ini bertolak belakang dengan kesimpulan dari Suryani dan Woyanti (2021) dimana IPM ternyata berpengaruh signifikan dan berkoeffisien negatif. Berdasarkan perbedaan hasil penelitian para peneliti tersebut, maka diperlukan adanya penelitian lain yang mampu memperkuat analisis terkait ketimpangan yang terjadi di Indonesia, yang diharapkan dapat memberikan rekomendasi atau gagasan lain untuk menurunkan angka ketimpangan pendapatan khususnya di lima Provinsi tertimpang di Indonesia yakni Provinsi DI Yogyakarta, Gorontalo, Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Papua. Hal-hal tersebutlah yang melatarbelakangi penelitian ini yang diberi judul **“ANALISIS FAKTOR PENYEBAB KETIMPANGAN PENDAPATAN PADA LIMA PROVINSI TERTIMPANG DI INDONESIA”**.

I.2 Perumusan Masalah

Permasalahan terkait ketimpangan pendapatan yang ada pada lima Provinsi di Indonesia ini masih riskan, bahkan angkanya melebihi rasio ketimpangan pendapatan Indonesia secara nasional dan cenderung berfluktuasi dengan pertumbuhan ekonomi yang relatif stagnan. Data menunjukkan bahwa dalam 6 tahun terakhir terdapat enam Provinsi meliputi DI Yogyakarta, Gorontalo, Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Papua yang secara konsisten menempati 10 besar daerah dengan ketimpangan tertinggi di Indonesia, dan puncaknya berada pada lima besar pada tahun 2020. Hal ini menggambarkan bahwa kelima Provinsi tersebut

masih belum mampu mengatasi masalah kesenjangan yang terjadi hingga kini pada wilayahnya masing-masing. Kebaharuan pada penelitian ini terletak pada pemilihan daerah yang diteliti dimana mencakup pada lima Provinsi di Indonesia yang memiliki angka ketimpangan tertinggi dimana terdapat beberapa daerah yang jarang sekali diperhatikan terkait kondisi ketimpangan pendaptannya seperti Papua dan Gorontalo karena mayoritas peneliti sebelumnya lebih berfokus pada Provinsi di Pulau Jawa, selain itu tahun penelitian juga berbeda dimana dalam penelitian ini digunakan enam tahun dengan data terbaharui hingga tahun 2020. Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan di lima Provinsi tertimpang di Indonesia?
2. Bagaimana pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap ketimpangan pendapatan di lima Provinsi tertimpang di Indonesia?
3. Bagaimana pengaruh Upah Minimum Provinsi terhadap ketimpangan pendapatan di lima Provinsi tertimpang di Indonesia?
4. Bagaimana pengaruh Belanja Modal Pemerintah Provinsi terhadap ketimpangan pendapatan di lima Provinsi tertimpang di Indonesia?

I.3 Tujuan Penelitian

Adapun penelitian ini dilakukan demi tercapainya beberapa tujuan sebagai berikut :

1. Mengetahui apakah terdapat pengaruh dari pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan di lima Provinsi tertimpang di Indonesia.
2. Mengetahui apakah terdapat pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap ketimpangan pendapatan di lima Provinsi tertimpang di Indonesia.
3. Mengetahui apakah terdapat pengaruh Upah Minimum Provinsi terhadap ketimpangan pendapatan di lima Provinsi tertimpang di Indonesia.
4. Mengetahui apakah terdapat pengaruh dari Belanja Modal pemerintah Provinsi terhadap ketimpangan pendapatan di lima Provinsi tertimpang di Indonesia.

I.4 Manfaat Penelitian

Peneliti berharap dengan hadirnya penelitian ini, akan membawa manfaat kepada berbagai pihak yang membutuhkan diantaranya :

1. Manfaat Teoritis

Menambah wawasan serta pengetahuan berkaitan dengan faktor tertentu yang dapat berpengaruh pada ketimpangan pendapatan di lima Provinsi tertimpang di Indonesia, serta harapannya penelitian ini bisa dimanfaatkan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan dan dapat dijadikan contoh studi kasus yang bisa dipelajari dalam dunia perkuliahan.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Peneliti

Peneliti berharap penelitian ini dapat dijadikan sarana dalam mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang peneliti dapatkan selama dibangku kuliah berkaitan dengan permasalahan ekonomi khususnya perihal masalah ketimpangan pendapatan.

b) Bagi Pemerintah Daerah dan Pusat

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi berupa pemikiran maupun gagasan mengenai upaya yang mungkin dapat dilakukan oleh pemerintah untuk menciptakan pemerataan distribusi pendapatan di masa mendatang sekaligus dapat menjadi acuan untuk memperbaiki kinerja saat ini agar dapat meminimalisir ketimpangan dan menciptakan kesejahteraan masyarakat.

c) Bagi Mahasiswa dan Masyarakat

Diharapkan penelitian dapat menjadi sumber referensi bagi peneliti berikutnya yang berminat melakukan penelitian serupa, sekaligus memacu mahasiswa untuk mampu aktif dalam berpikir kritis terhadap kondisi ekonomi di Indonesia dewasa ini. Bagi masyarakat luas, diharapkan penelitian ini dapat diterima dengan baik sehingga dapat menumbuhkan rasa kepedulian terkait adanya permasalahan ketimpangan pendapatan, serta dapat meningkatkan semangat dalam berusaha memperbaiki kualitas hidupnya untuk mengurangi permasalahan ketimpangan.